

Kebijakan Luar Negeri 100 Hari Pemerintahan Prabowo



Credit: Facebook.com/PrabowoSubianto

Prabowo telah menyambangi belasan negara dan menghadiri beberapa forum penting di awal pemerintahannya. Bahkan, sebelum pelantikannya sebagai presiden, ia sudah mulai melakukan misi diplomasi ke mancanegara seperti Cina, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, Uni Emirat Arab, Mesir, Malaysia, hingga India. Tidak seperti pendahulunya, Presiden Joko Widodo, pemerintahan Prabowo menunjukkan orientasi politik luar negeri yang lebih outward-looking. Bahkan ia sendiri memerankan sebagai *foreign policy president*.

Di dalam negeri, dalam 100 hari kerja, tingkat kepuasan masyarakat— menurut beberapa lembaga survei— mencapai 80%, melebihi tingkat kepuasan publik terhadap pendahulunya. Angka ini cukup mengejutkan mengingat beberapa isu kebijakan mendapat sentimen negatif, seperti kabinet yang gemuk, pemotongan anggaran besar-besaran, masalah koordinasi, kebijakan lingkungan dan iklim, dan carut marut kebijakan populisnya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bagaimana kebijakan-kebijakan politik luar negeri Prabowo berpotensi memberikan keuntungan bagi kepentingan domestik?

BRICS atau OECD?

Dua hari setelah dilantik menjadi presiden, Prabowo mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia didapukannya menjadi anggota baru kelompok ekonomi yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan itu. Sugiono sempat bertutur bahwa Indonesia bermaksud untuk “menjadi *bridge builder*” dalam aksesi keanggotaannya. Mungkin aksesi ini dapat meningkatkan daya tawar Indonesia terhadap negara-negara Barat, terutama Uni Eropa dan Amerika Serikat era Trump. Keanggotaan BRICS juga memberikan Indonesia kesempatan untuk mendiversifikasi sumber keuangan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur besar dan menarik investasi asing.

Kebijakan ini bertolak belakang dengan pendahulunya yang mempersiapkan Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Profesor Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM sekaligus peneliti senior Institute of International Studies (IIS), Poppy S. Winanti, dalam wawancara di stasiun TV CNA (2025), mengatakan bahwa persiapan menjadi anggota OECD lebih ditujukan untuk membenahi tata-kelola pemerintahan Indonesia mengikuti standar-standar OECD. Sementara, BRICS yang kurang memiliki daya dorong untuk reformasi internal, dapat menjadi arena politik baru bagi pemerintahan Prabowo dalam geopolitik yang berubah. Namun, isu sentralnya adalah apa kepentingan Indonesia yang akan diproyeksikan melalui BRICS?

Kontradiksi Prioritas Kebijakan

Keanggotaan BRICS sejatinya dapat memberikan ruang bagi Indonesia untuk mendiversifikasi sumber pendanaan pembangunan misalnya melalui New Development Bank (NDB) dan menjadi arena untuk mengadvokasi isu-isu yang dihadapi negara-negara Selatan secara lebih kuat. Namun, langkah-langkah Prabowo dalam menentukan arah kebijakan masih sporadis. Pasalnya, belum ada prioritas yang jelas dalam menghadapi isu-isu domestik dan bagaimana memproyeksikannya dalam kebijakan luar negeri.

Tanpa ada upaya untuk menyambungkan isu domestik dan arena strategis politik luar negeri, kebijakan pemerintahan Prabowo hanya akan melahirkan kontradiksi-kontradiksi akut. Winanti dalam wawancaranya bersama CNA (2025), lebih lanjut, menilai bahwa hal ini terjadi karena Prabowo lebih mengutamakan memastikan dukungan internal dan melayani kepentingan sekutunya.

Pendekatan Prabowo dengan ASEAN, yang selama ini menjadi prioritas utama diplomasi Indonesia, juga tidak terlalu sentral dalam 100 hari kinerja pemerintahannya. ASEAN memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas regional dan sebagai forum multilateral yang strategis bagi Indonesia, khususnya dalam mengelola potensi ketegangan Indo-Pasifik dan memajukan regionalisme kawasan. Terlalu fokus dengan negara-negara besar yang

saling bersaing dengan relatif mengabaikan kawasan akan kontraproduktif bagi kepentingan Indonesia sendiri. Misalnya, dengan masuknya Indonesia ke dalam BRICS, proyeksi dan kepentingan apa yang akan diperjuangkan. Terlebih, BRICS juga menjadi arena kontestasi khususnya dalam isu kepemimpinan, antara Cina, Rusia dan India.

Penutup

100 hari pemerintahan Prabowo cukup menunjukkan bahwa kebijakan politik luar negerinya yang lebih aktif di forum internasional. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan luar negeri pendahulunya perlu dikoreksi. Sebagaimana diuraikan, setidaknya terdapat tiga tantangan besar ke depan. *Pertama*, memastikan bahwa orientasi politik luar negeri pemerintahan Prabowo memiliki dampak yang nyata dan terukur bagi kepentingan dan agenda nasional. *Kedua*, pentingnya mengelola kontradiksi kebijakan luar negeri yang baru— tanpa “mengorbankan” mitra dan manfaat yang selama ini diperoleh dari tatanan global yang ada. *Ketiga*, memerlukan proyeksi dan diplomasi yang lebih strategis dan efektif untuk mendukung kebijakan politik luar negeri yang *outward looking*.

Tata letak: Dian Adi Marianto

Cara mengutip:

Institute of International Studies (2025). *Kebijakan Luar Negeri 100 Hari Pemerintahan Prabowo* [Commentaries]. Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, Indonesia. <http://ugm.id/KebijakanLuarNegeri100HariPrabowo>.

Referensi

CNA. (2025, January 27). *A look at Indonesian President Prabowo's first 100 days in office*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=-GYhnipeFcc>

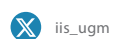
About Us

IIS Commentaries is a platform for academics, researchers, and analysts to convey their ideas or perspectives on the latest international issues. IIS Commentaries is published periodically in two languages, either Bahasa Indonesia or English. Analyses presented in IIS Commentaries represent the authors' views and not represent the institutions they are affiliated with or Institute of International Studies (IIS), Universitas Gadjah Mada. Please reach out to the editorial team for any inquiries at publication.iis@ugm.ac.id.



Institute of International Studies (IIS) is an Indonesian leading research institute under the Department of International Relations, Universitas Gadjah Mada. Established in 2010, it commits to developing a theoretical understanding of international relations through the perspective of Global South and incorporating them at the practical level for the actualisation of peace and justice.

iis.fisipol.ugm.ac.id



for more information about this brief, please contact:
IIS Publication Division
Tria Nadila +62 813 8153 7878
publication.iis@ugm.ac.id